



BUPATI BATANG

Alamat: Jl. R.A. Kartini No. 1 Telp (0285) 91571, 91050 Batang

Nomor : 591.2/638.b/2000
Sifat : Segera Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Tanah
Kawasan Hutan oleh
Masyarakat

Batang, 31 Oktober 2000

Kepada

Yth. Menteri Pertanian dan
Kehutanan Indonesia
d/a. Gedung Manggala Wanabakti
Jln. Gatot Soebroto, Senayan
Jakarta Pusat

Memperhatikan tuntutan/permohonan Masyarakat Desa Kalisari Kecamatan Reban dan Masyarakat Desa Sibebek Kecamatan Bawang Kabupaten Batang Jawa Tengah, pada prinsipnya masyarakat menghendaki dan memohon kepada Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Menteri Pertanian dan Kehutanan sebagai berikut :

1. Perum Perhutani segera mengembalikan tanah Desa Kalisari dan Desa Sibebek yang dulu dianggap sebagai tanah Tegalpangonan tetapi ditanami oleh Perhutani dan dijadikan hutan.
2. Agar secepatnya Perum Perhutani mengadakan pengukuran kembali tanah Kawasan Hutan yang berada di sekitar Desa Kalisari, Desa Sibebek dan lain-lain yang disebut komplek hutan Wanar bersama-sama tokoh masyarakat, perangkat desa, Maspika, Pemerintah Kabupaten dan Kantor Pertanahan (BPN) serta dinas/instansi terkait.
3. Tanah dimaksud di atas akan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian.

Dengan adanya tuntutan masyarakat, kami telah mengaktifkan Panitia Tata Batas Hutan Tingkat Kabupaten Batang (Surat Keputusan Bupati Batang Nomor 522/331/1999, tanggal 10 Juni 1999), untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Kehutanan dan telah diambil langkah-langkah antara lain :

1. Panitia Tata Batas Hutan telah melaksanakan pendekatan kepada masyarakat dengan mengadakan pertemuan-pertemuan untuk mencari penyelesaian secara musakat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta menawarkan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, yaitu Perhutanan Sosial dan lain-lain.

2. Panitia Tata Batas Hutan terjun langsung ke lapangan untuk :

- a. Menelusuri sejarah, asal-usul tanah dan bukti-bukti kepemilikan yang sah.
- b. Membentuk Tim Kecil yang beranggotakan tokoh masyarakat untuk membantu Panitia Tata Batas Hutan di lapangan.
- c. Membantu masyarakat membuatkan sket peta Tanah Kawasan Hutan yang dianggap sebagai Tegalpengonan dan dimohon masyarakat.

Hasil Kerja Panitia Tata Batas Hutan Kabupaten Batang sepenuhnya dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Batas Hutan tanggal 3 April 2000 untuk wilayah Desa Kalisari Kec. Reban dan Berita Acara Pemeriksaan Batas Hutan tanggal 27 Juni 2000 untuk wilayah Desa Sibebek Kec. Bawang.

Demikian untuk menjadikan maklum dan mohon jawaban seperlunya.



TEMBUSAN Kepada Yth. :

1. Menteri Muda Kehutanan Republik Indonesia ;
2. Gubernur Jawa Tengah ;
3. Direktur Utama Perum Perhutani ;
4. Kakanwil Kehutanan Propinsi Jawa Tengah ;
5. Kepala Unit I Perum Perhutani Jawa Tengah ;
6. Ketua DPRD Kabupaten Batang ;
7. Pembantu Bupati Batang Wil. Bawang ;
8. Camat Bawang ;
9. Camat Reban ;
10. Kepala Desa Sibebek Kec. Bawang ;
11. Kepala Desa Kalisari Kec. Reban ;
12. Administrator Perum Perhutani /KKPH Pekalongan Timur ;
13. Anggota Panitia Tata Batas Hutan Kabupaten Batang ;
14. Arsip.



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : 777/Kpts-II/1997

TENTANG

PENUNJUKAN TANAH SELUAS 440,105 (EMPAT RATUS EMPAT PULUH, SERATUS LIMA PERSERIBU) HEKTAR YANG TERLETAK DI KOMPLEK HUTAN WANAR, BAGIAN HUTAN BANDAR, KPH PEKALONGAN TIMUR, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BATANG, PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH MENJADI KAWASAN HUTAN TETAP DENGAN FUNGSI HUTAN PRODUKSI

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 13 Juni 1991 Nomor 593/22850, tanah negara seluas 440,105 (empat ratus empat puluh, seratus lima perseribu) hektar yang terletak di Komplek Hutan Wanar, Bagian Hutan Bandar, KPH Pekalongan Timur, Kabupaten Daerah Tingkat II Batang, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang secara konservasi/ekologis dan geografis perlu dipertahankan sebagai kawasan hutan;
- b. bahwa berdasarkan paduserasi Tata Guna Hutan Kesepakatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah (SK Gubernur Nomor 591/76/1996 tanggal 16 Juli 1996) tanah negara sebagaimana dimaksud dalam butir a tersebut merupakan kawasan budidaya kehutanan;
- c. bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas tanah negara sebagaimana tersebut di atas sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan, maka dipandang perlu untuk menunjuk tanah negara seluas 440,105 (empat ratus empat puluh, seratus lima perseribu) hektar yang terletak di Komplek Hutan Wanar, Bagian Hutan Bandar, KPH Pekalongan Timur, Kabupaten Daerah Tingkat II Batang, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah menjadi kawasan hutan tetap dengan fungsi hutan produksi dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

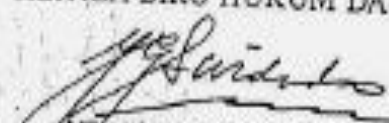
Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1967;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1970;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985;
 4. Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1984 jo. Keputusan Presiden Nomor 58 tahun 1993;
 5. Keputusan Presiden Nomor 96/M tahun 1993;
 6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 178/Kpts/Um/4/1975;
 7. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 399/Kpts-II/1990 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 634/Kpts-II/1996;
 8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 677/Kpts-II/1993.
- Memperhatikan :
1. SK. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 591/76/1996 tanggal 16 Juli 1996.
 2. Peta Padu Serasi Tata Guna Hutan Kesepakatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah skala 1 : 250.000.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk tanah seluas 440,105 (empat ratus empat puluh, seratus lima perseribu) hektar yang terletak di Komplek Hutan Wanar, Bagian Hutan Bandar, KPH Pekalongan Timur, Kabupaten Daerah Tingkat II Batang, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah menjadi kawasan hutan tetap dengan fungsi Hutan Produksi dan diberi nama Komplek Hutan Wanar.
- KEDUA** : Batas sementara kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** adalah sebagaimana tertera pada peta lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Direktur Utama Perum Perhutani untuk mengadakan penataan batas di lapangan atas kawasan hutan tersebut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,


YB. WIDODO SUTOYO, SH. MM.
NIP. 080023934,

Ditetapkan di : J A K A R T A
pada tanggal : 16 Desember 1997.

MENTERI KEHUTANAN,

td.

Salinan Keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

DJAMALUDIN SURYOHADIKUSUMO.

1. Sdr. Menteri Dalam Negeri.

2. Sdr. ...

2. Sdr. Menteri Pertanian.
3. Sdr. Menteri Pekerjaan Umum.
4. Sdr. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
5. Sdr. Pejabat eselon I lingkup Departemen Kehutanan.
6. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
7. Sdr. Direktur Utama Perum Perhutani.
8. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Jawa Tengah.
9. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah.
10. Sdr. Kepala Unit I Perum Perhutani Jawa Tengah.
11. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Batang.

REKAPITULASI KAWASAN HILITAN WANAR BERDASARKAN PETAK DAN LETAK MENURUT WILAYAH PEMERINTAHAN

A. Menurut petak dan anak petak

Petak	Anak petak	Luas	Keterangan
03	4	27.80	
04	8	78.50	
05	14	139.20	
06	7	72.10	
07	14	124.40	
Jumlah	57	440.10	

B. Menurut letak pemerintahan wilayah

1. Kecamatan Terseno	
1. Desa Wanar	159.50 Ha
2. Desa Lobang	150.60 Ha
3. Desa Sumurba	18.50 Ha
Jumlah	329.50 Ha

2. Kecamatan Dawang	
1. Desa Sibetok	55.00 Ha
2. Desa Sengubanyu	5.70 Ha
3. Desa Cahoroja	5.40 Ha
4. Desa Purba	7.40 Ha
Jumlah	73.50 Ha

3. Kecamatan Reban	
1. Desa Kalisan	
2. Desa Kemusu	17.00 Ha
Jumlah	31.50 Ha

4. Kecamatan Limbung	
1. Desa Sukomang	6.50 Ha
Jumlah	6.50 Ha

Jumlah 1 s.d 4 kecamatan	440.10 Ha.
--------------------------	------------



H. Dawang
[Signature]

716.134.356

LAPORAN MONOGRAFI DESA

Halaman.....(01)
STATIS DES :...[...][...]
Semester ke:[...] [199.]

01. LUAS WILAYAH DESA:	04.02. DAM.....bh.....ha
01.01. LUAS LAHAN SAWAH:	03. KINCIR AIR.....bh.....ha
01.01.a. Irigasi teknis.....ha	04. POMPA AIR (MESIN).....bh.....ha
b. Irigasi Setengah Teknis.....ha	05. AIR TERJUN (lb:2 m, tgg:10 m+).....bh
c. Irigasi Sederhana P U.....ha	05. SARANA KAPAL/PERAHU:
d. Irigasi Sederhana Non PU: 3648 ha	05.01. KAPAL MOTOR.....bh.....pk
e. Tadah Hujan.....17.629 ha	02. PERAHU MOTOR TEMPEL.....bh.....pk
f. Jumlah LUAS LAHAN SAWAH : 52.228 ha	03. PERAHU TAK BERMOTOR.....bh
01.02. LUAS LAHAN HUKAN SAWAH:	06. PANJANG JALAN:
01.02.a. Pakarungan/bangunan.....40.909 ha	06.01.a. Klas II.....KM, rusak:.....KM
b. Tegalan/kebunan.....16.999 ha	b. Klas III.....KM, rusak:.....KM
c. Padang penggembalaan.....31.342 ha	c. Klas IIIA.....KM, rusak:.....KM
d. Rawa-rawa.....ha	d. Klas IV.....KM, rusak:.....KM
e. Tambak.....ha	e. Klas V.....KM, rusak:.....KM
f. Kolam/Tebat/Rempang.....9.021 ha	f. JUMLAH.....KM, rusak:.....KM
g. Hutan Rakyat.....ha	06.02. PANJANG JALAN DESA:
h. Hutan Negara.....14.474 ha	06.02.a. Aspal.....KM, rusak:.....KM
i. Perkebunan Negara/Swasta.....ha	b. Non Aspal.....KM, rusak:.....KM
j. Lainnya: sungai, jalan, kuburan, dll.....11.640 ha	c. Jumlah.....KM, rusak:.....KM
k. Jumlah LUAS LAHAN KERING: 49.609 ha	06.03. BANYAKNYA JEMBATAN (pj: 7 m+).....bh
01.03. JUMLAH (LUAS DESA).....ha	07. SARANA PEREKONOMIAN:
02.01. BANYAKNYA:	07.01. PASAR:
02.01.a. Dukuh:.....	07.01.a. Pasar Umum.....bh
b. R W 13.....	b. Pasar Ikan.....bh
c. R T 172.....	c. Pasar Hewan.....bh
02.02. KLASIFIKASI DESA:	d. Jumlah PASAR.....bh
02.02.a. Swadaya.....[1.]	07.02. TOKO, KIOS, WARUNG.....4 bh
b. Swakarya.....[7.]	03. KOPERASI UNIT DESA (KUD).....bh
c. Swasembada.....[7.]	04. KOPERASI SIMPAN PINJAM.....bh
03. SARANA PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN:	05. BADAN KREDIT DESA (BKD).....bh
03.01. BALAI DESA/KELURAHAN.....1 bh	06. LUMBUNG DESA.....bh
02. KANTOR DESA/KELURAHAN.....1 bh	07. PERUSAHAAN/USAHAA:
03. BENGKOK PAMONG DESA	07.07.a. INDUSTRI:
03.a. Tanah sawah.....4.240 ha	07.07.a.1. Industri Besar.....bh, tdk:.....
b. Tanah kering.....ha	2. Industri Sedang.....bh, tdk:.....
c. Tambak/kolam.....ha	3. Industri Kecil.....bh, tdk:.....
d. Jumlah BENGKOK PAMONG.....4.240 ha	4. Kerajinan rn. tgg:.....bh, tdk:.....
03.04. TANAH KAS DESA/KELURAHAN:	5. Jumlah INDUSTRI:.....bh, tdk:.....
a. Tanah sawah.....ha	07.07.b. PERHOTELAN.....bh, tdk:.....
b. Tanah kering.....ha	c. RUMAH WR MAKAN.....bh, tdk:.....
c. Tambak/kolam.....ha	d. USAHA PERDAGANGAN:.....bh, tdk:.....
d. Jumlah TANAH KAS DESA/KEL:.....ha	e. USAHA ANGKUTAN:.....bh, tdk:.....
03.05. JUMLAH BENGKOK KAS DESA/KEL:.....ha	f. USAHA LAINNYA:.....bh, tdk:.....
04. PRASARANA PENCAIRAN:	CATATAN:
04.01. MADUK:	tdk = tenaga kerja
04.01.a. Baik.....bh.....ha	hh = buah
b. Rusak dpt dipakai:.....bh.....ha	
c. Rusak tak dipakai:.....bh.....ha	

LAPORAN MONOGRAFI DESA

Halaman.....(02)

STATIS DESA...[...][...]

Semester ke...[...][199.]

08. BANYAKNYA RUMAH PENDUDUK: ✓ VI
(DINDINGNYA TERBUAT DARI):
08.01. TEMBOK/GEDUNG (PERMANEN):...6...bh
02. SEBAGIAN TEMBOK.....7...bh
03. KAYU/PAPAN.....209...bh
04. BAMBU/LAINNYA.....2...bh
05. Jumlah RUMAH PENDUDUK...210...bh

09. SARANA SOSIAL HUDA: YH
09.01. BANYAKNYA SEKOLAH, GURU, DAN MURID:

JENIS SEKOLAH	S	G	M
(1)	(2)	(3)	(4)
a. TK	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>35</u>
b. SD	<u>1</u>	<u>6</u>	<u>176</u>
c. SLTP UMUM			
d. SLTP KEJURUAN			
e. SLTA UMUM			
f. SLTA KEJURUAN			
g. AKADEMI/PERTI			
h. KURSUS-KURSUS			
i. MADRS. ISTIDAIYAH			
j. MADRS. TSANAWIYAH			
k. MADRASAH ALIYAH			
l. J U M L A H	<u>2</u>	<u>7</u>	<u>211</u>

09.02. BANYAKNYA TEMPAT IBADAT:
09.02.a. Mesjid.....1...bh
b. Surau/Musholla.....4...bh
c. Gereja.....7...bh
d. Kuil/Vihara.....7...bh
e. Jumlah TEMPAT IBADAT...5...bh

09.03. SARANA REKRREASI:
09.03.a. Bioskop.....7...bh
Tempat duduk.....7...bh
b. Wayang orang/Katoprak/
Ludruk/Sandiwara.....7...bh
Tempat duduk.....7...bh
c. Organisasi Kesenian.....7...bh
Tempat duduk.....7...bh
d. 1.Tempat Rekreasi alam:.....7...bh
2.Tempat Rekreasi Sejah:.....7...bh

09.04. SARANA KESEHATAN:
09.04.a. Rumah Sakit Umum (RSU):.....7...bh
Tempat tidur.....7...bh
b. Rumah Sakit Bersalin.....7...bh
Tempat tidur.....7...bh
c. 1.PUSKESMAS.....7...bh
2.PUSKESMAS PENDANTU.....7...bh

09.04.d.B K I A.....7...bh
e.B P (Balai Pengobatan).....7...bh
f.Pos Kesehatan.....7...bh
g.Dokter.....7...bh
h.Perawat/Pet Kesehatan.....7...bh
i.Bidan.....7...bh
j.Dukun Bayi.....2...bh
k.Jamban.....7...bh

10. PEMBANGUNAN:

10.01. PEMBANGUNAN FISIK:

10.01.a. Banyaknya.....7...bh
10.01.b. Biaya PEMERINTAH: (dlm ribuan rupiah)
10.01.b.1. Pemerintah Pusat.....Rp 2.250.000,-
2. Provinsi dati I.....Rp.....
3. Kabupaten dati II.....Rp.....
4. Jumlah BIAYA PEMERINTAH: Rp 2.250.000,-
10.01.c. Biaya SWADAYA PENDUDUK.....Rp 500.000,-
10.01.c.1. Berupa uang.....Rp.....
2. Barang dan tenaga.....Rp 500.000,-
3. Jumlah BIAYA SWADAYA.....Rp 500.000,-
10.01.d. JUMLAH BIAYA (b4 + c3).....Rp 2.750.000,-

10.02. PEMBANGUNAN NON FISIK:

10.02.a. Banyaknya.....1...bh
b. Diantaranya:
10.02.b.1. Pengayahan Routine
2.....
3.....
4.....
5.....

CATATAN:

Kalisan..., tanggal: 31-1-1994

PENYUSUN LAPORAN,

MENGTAHUI:

KEPADA DESA/KELURAHAN:

SUTIKNO

NIP.....

